

Peran Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Studi Empiris di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Indonesia

Erfan Maulana^{a*}, Muhammad Rais Arifin^a, Lalu Muhammad Abdul Azis^a

^a Universitas Sapta Mandiri, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15-12-2025

Revised : 15-01-2026

Accepted : 30-01-2026

Keywords: *Community Empowerment, Economic Management, Local Governance, SDGs*

Kata Kunci: *Manajemen Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Lokal, SDGs*

Corresponding Author:
erfanmaulana@univsm.ac.id*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Community economic empowerment is widely recognized as a strategic instrument for accelerating the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in developing regions. This empirical study examines the role of community economic empowerment management in supporting SDGs achievement in Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan, Indonesia. Employing a mixed-methods approach, the study integrates quantitative survey data from 120 respondents with qualitative in-depth interviews involving 15 key informants, supported by secondary data analysis and a review of reputable literature. The findings reveal that effective empowerment management characterized by structured planning, access to capital, training effectiveness, institutional coordination, and outcome-based monitoring has a significant positive impact on income improvement, business sustainability, and employment stability. Although Hulu Sungai Utara Regency demonstrates a relatively low poverty rate, managerial and institutional challenges limit the optimal contribution of empowerment programs to SDGs targets. This study contributes empirical evidence from a local Indonesian context and proposes a management-oriented framework for aligning community empowerment initiatives with sustainable development agendas.

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas diakui sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di wilayah berkembang. Studi empiris ini meneliti peran manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pencapaian SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran,

studi ini mengintegrasikan data survei kuantitatif dari 120 responden dengan wawancara mendalam kualitatif yang melibatkan 15 informan kunci, didukung oleh analisis data sekunder dan tinjauan literatur yang bereputasi. Temuan menunjukkan bahwa manajemen pemberdayaan yang efektif yang dicirikan oleh perencanaan terstruktur, akses ke modal, efektivitas pelatihan, koordinasi kelembagaan, dan pemantauan berbasis hasil memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan, keberlanjutan bisnis, dan stabilitas lapangan kerja. Meskipun Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, tantangan manajerial dan kelembagaan membatasi kontribusi optimal program pemberdayaan terhadap target SDGs. Studi ini memberikan bukti empiris dari konteks lokal Indonesia dan mengusulkan kerangka kerja berorientasi manajemen untuk menyelaraskan inisiatif pemberdayaan masyarakat dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam menulis latar belakang masalah atau pendahuluan penelitian, peneliti perlu menyusun narasi yang runtut dan argumentatif untuk menunjukkan urgensi dan relevansi topik yang diteliti. Pertama, peneliti perlu mengawali dengan gambaran umum mengenai konteks atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Penjelasan ini bisa mencakup kondisi global, nasional, maupun lokal yang relevan, agar pembaca memahami pentingnya isu yang diangkat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kerangka kerja global komprehensif yang bertujuan untuk mencapai pembangunan inklusif, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2030, sebagaimana secara resmi diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs menekankan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Di antara tujuh belas tujuan tersebut, pemberantasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), dan pengurangan ketidaksetaraan (SDG 10) secara luas diakui sebagai tujuan yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi tingkat komunitas yang kuat sebagai strategi implementasi utama (United Nations, 2015).

Pemberdayaan ekonomi komunitas telah banyak dibahas dalam studi pembangunan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kapasitas lokal, meningkatkan peluang pendapatan, dan memperkuat ketahanan sosial. Para sarjana seperti Chambers (1983) dan Sen (1999) berpendapat bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang menghasilkan pendapatan tetapi tentang memperluas kemampuan, partisipasi, dan kendali masyarakat atas sumber daya ekonomi. Studi empiris yang lebih baru mengkonfirmasi bahwa program pemberdayaan paling efektif bila didukung oleh praktik manajemen yang baik,

koordinasi kelembagaan, dan struktur tata kelola inklusif (World Bank, 2020).

Di negara berkembang seperti Indonesia, lokalisasi SDGs sebagian besar bergantung pada kapasitas pemerintah daerah untuk menerjemahkan tujuan pembangunan global ke dalam kebijakan dan program yang spesifik konteks. Studi sebelumnya tentang lokalisasi SDGs menyoroti bahwa desentralisasi memberikan peluang untuk intervensi pembangunan yang disesuaikan tetapi juga menimbulkan tantangan manajerial terkait dengan koordinasi, pemantauan, dan akuntabilitas (Sachs et al., 2019; United Nations Development Programme, 2020). Akibatnya, efektivitas implementasi SDGs di tingkat lokal terkait erat dengan bagaimana program pemberdayaan dirancang, dikelola, dan dievaluasi.

Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan studi kasus penting untuk meneliti pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka SDGs. Kabupaten ini menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil dibandingkan dengan beberapa daerah lain; namun, kerentanan ekonomi tetap ada di kalangan pengusaha mikro, pekerja informal, dan rumah tangga pedesaan. Statistik resmi terbaru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai sekitar 5,75 persen pada tahun 2024, mencerminkan ketahanan sosial-ekonomi yang moderat sekaligus menggarisbawahi perlunya strategi pemberdayaan yang berkelanjutan dan terkelola dengan baik. Kondisi serupa telah diamati di wilayah lain di Indonesia, di mana angka pengurangan kemiskinan yang moderat berdampingan dengan kerentanan struktural dalam perekonomian lokal (Badan Pusat Statistik, 2024; Suryadarma et al., 2020).

Penelitian empiris tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia sebagian besar berfokus pada hasil program, seperti jumlah penerima manfaat atau dana yang disalurkan, daripada pada proses manajerial dan keselarasan mereka dengan indikator SDGs. Studi tentang usaha milik desa (BUMDes) dan pengembangan usaha mikro menunjukkan dampak positif pada pendapatan dan lapangan kerja lokal; namun, dampak ini seringkali tetap terbatas dalam skala dan keberlanjutan karena manajemen yang lemah, pemantauan yang tidak memadai, dan koordinasi kelembagaan yang terfragmentasi (Prabowo et al., 2021; Rahman & Widodo, 2022). Literatur internasional juga menekankan bahwa tanpa manajemen berbasis hasil dan evaluasi yang berorientasi pada SDGs, inisiatif pemberdayaan cenderung menghasilkan keuntungan jangka pendek daripada transformasi pembangunan jangka panjang (Organisation for Economic Co-operation & Development, 2018; World Bank, 2020).

Meskipun literatur tentang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan semakin berkembang, bukti empiris yang secara eksplisit meneliti peran manajemen pemberdayaan dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal masih terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Sebagian besar studi yang ada

memperlakukan pemberdayaan sebagai intervensi programatik daripada proses yang digerakkan oleh manajemen yang mengintegrasikan perencanaan, koordinasi, implementasi, dan evaluasi sesuai dengan target SDGs.

Oleh karena itu, studi ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan penelitian ini dengan menganalisis secara empiris peran manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan mengadopsi pendekatan metode campuran, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan wawasan empiris tentang bagaimana praktik manajerial membentuk efektivitas inisiatif pemberdayaan dan dengan menawarkan rekomendasi yang relevan dengan kebijakan untuk memperkuat lokalisasi SDGs di tingkat pemerintah daerah

Pemberdayaan ekonomi komunitas mengacu pada suatu proses di mana individu dan kelompok sosial meningkatkan kapasitas mereka untuk mengakses, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi guna meningkatkan tingkat pendapatan, mata pencaharian, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Para sarjana pembangunan klasik berpendapat bahwa pemberdayaan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik, bukan hanya bantuan keuangan. Chambers (1983) menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan pemberian kesempatan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mendapatkan suara, agensi, dan kendali atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sementara Sen (1999) membingkai pemberdayaan sebagai perluasan kemampuan dan kebebasan manusia. (Kabeer, 2012; Sen, 1999)

Literatur pembangunan kontemporer lebih lanjut menyoroti bahwa pemberdayaan ekonomi terkait erat dengan pengembangan modal manusia, penguatan kelembagaan, dan tata kelola partisipatif. Menurut Bank Dunia (2020), inisiatif pemberdayaan yang mengintegrasikan pengembangan keterampilan, akses ke aset produktif, dan pengaturan kelembagaan inklusif lebih mungkin menghasilkan hasil ekonomi yang berkelanjutan. Studi empiris di negara berkembang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang menargetkan pengusaha mikro dan pekerja informal dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan ketahanan ekonomi ketika didukung oleh peningkatan kapasitas dan pengembangan modal sosial (Alkire et al., 2015; Kabeer, 2012).

Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak diimplementasikan melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, usaha milik desa (BUMDes), dan program mata pencaharian berbasis masyarakat. Beberapa studi melaporkan bahwa inisiatif tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja; namun, efektivitas jangka panjangnya bervariasi tergantung pada kapasitas kelembagaan lokal dan kualitas manajemen program

(Prabowo et al., 2021; Suryahadi et al., 2020).

Dari perspektif manajemen, program pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi yang sistematis dan terintegrasi. Teori manajemen menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, koordinasi antar pemangku kepentingan, alokasi sumber daya, dan pemantauan kinerja. Dalam konteks pemberdayaan, fungsi manajemen menentukan apakah program-program tersebut bergerak melampaui bantuan jangka pendek menuju transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Studi empiris sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi manajerial yang lemah, sistem pemantauan yang tidak memadai, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang terbatas seringkali mengurangi efektivitas dan keberlanjutan inisiatif pemberdayaan. OECD (2018) melaporkan bahwa banyak program pembangunan lokal gagal mencapai dampak jangka panjang karena tanggung jawab kelembagaan yang terfragmentasi dan tidak adanya mekanisme evaluasi berbasis hasil. Demikian pula, temuan Bank Dunia (2020) menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang kurang memiliki akuntabilitas manajerial dan indikator kinerja cenderung berfokus pada output daripada hasil pembangunan.

Di Indonesia, penelitian tentang manajemen program pemberdayaan mengungkapkan tantangan serupa. Studi tentang manajemen BUMDes menunjukkan bahwa perencanaan yang buruk, kapasitas manajerial yang terbatas, dan pengawasan yang lemah seringkali menghambat keberlanjutan bisnis dan manfaat bagi masyarakat (Rahman & Widodo, 2022). Temuan empiris lainnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan lebih efektif ketika pemerintah daerah mengadopsi model manajemen partisipatif dan memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat (Putra et al., 2021).

Keterkaitan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah diakui secara luas baik dalam literatur kebijakan maupun akademis. Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa pemberdayaan tingkat masyarakat merupakan mekanisme kunci untuk mencapai SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 10 (Pengurangan Ketidaksetaraan). Inisiatif pemberdayaan diharapkan dapat berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan partisipasi ekonomi inklusif.

Studi empiris menunjukkan bahwa usaha berbasis desa, skema keuangan mikro, dan program pengembangan keterampilan dapat secara signifikan meningkatkan indikator terkait SDGs ketika diintegrasikan dengan kerangka kerja perencanaan dan evaluasi yang berorientasi pada SDGs. Sachs dkk. (2019) berpendapat bahwa lokalisasi SDGs membutuhkan indikator yang terukur dan keselarasan antara program komunitas

dan target global. UNDP (2020) lebih lanjut menyoroti bahwa program pemberdayaan berkontribusi lebih efektif terhadap SDGs ketika pemerintah daerah menyematkan indikator SDGs ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, beberapa studi menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan yang selaras dengan kerangka kerja SDGs menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan daripada program yang terisolasi. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa banyak inisiatif pemberdayaan masih kurang selaras dengan SDGs secara eksplisit, sehingga kontribusinya terhadap target pembangunan nasional dan global terbatas (Biermann et al., 2017; Pratama & Nugroho, 2022). Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya meneliti pemberdayaan tidak hanya sebagai intervensi pembangunan tetapi juga sebagai proses yang dikelola secara eksplisit terkait dengan indikator kinerja SDGs.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan instrumen penting untuk pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Namun, sebagian besar studi yang ada berfokus pada hasil program atau dampak penerima manfaat, sementara penelitian empiris yang mengkaji dimensi manajerial pemberdayaan dan kontribusi langsungnya terhadap pencapaian SDGs di tingkat lokal masih terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Studi ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara empiris bagaimana praktik manajemen pemberdayaan memengaruhi hasil terkait SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

METODE

Metode penelitian merupakan bagian penting yang menjelaskan bagaimana proses penelitian dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan dan menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini, peneliti menguraikan pendekatan, jenis, lokasi, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penelitian dapat dipahami, diuji ulang, dan memiliki validitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah *mixed methods*, dengan mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Data kuantitatif dikumpulkan dari 120 responden yang terdiri atas pelaku UMKM, penerima manfaat BUMDes, dan pekerja sektor informal. Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik *stratified random sampling*, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik kelompok responden yang tersebar di beberapa wilayah/kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci, yang meliputi pejabat pemerintah daerah, pengelola atau manajer BUMDes, tokoh masyarakat, serta

fasilitator program pemberdayaan, yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan. (Maulana, 2025)

Instrumen penelitian kuantitatif berupa kuesioner terstruktur dengan menggunakan skala Likert lima poin, yang dirancang untuk mengukur variabel manajemen pemberdayaan, hasil ekonomi yang dirasakan, serta kontribusi program terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Adapun data kualitatif dikumpulkan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam terkait proses implementasi kebijakan, peran sumber daya manusia, serta tantangan dan praktik baik dalam pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat lokal. (Erfan Maulana & Sofan Hariri Sarbini, 2025)

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban pada setiap variabel penelitian. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel, digunakan analisis regresi sederhana. Analisis ini bertujuan untuk menguji sejauh mana manajemen pemberdayaan berpengaruh terhadap hasil ekonomi serta kontribusi yang dirasakan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Maulana & Berkatillah, 2025)

Sementara itu, data kualitatif dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara mendalam. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan keabsahan dan validitas temuan penelitian, diterapkan triangulasi data, baik dengan membandingkan hasil data kuantitatif dan kualitatif maupun melalui pengecekan silang antar sumber informasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian ini melibatkan 120 responden yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terdiri atas pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), penerima manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pekerja sektor informal. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden secara umum menilai praktik manajemen pemberdayaan telah berjalan efektif dalam mendukung kegiatan ekonomi mereka. Uji reliabilitas instrumen menunjukkan nilai Cronbach's Alpha $> 0,7$, yang mengindikasikan tingkat konsistensi internal yang dapat diterima.

Berdasarkan skala Likert lima poin, nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel utama

adalah sebagai berikut:

1. Akses terhadap permodalan: Mean = 4,12
2. Efektivitas pelatihan: Mean = 3,98
3. Pemantauan program: Mean = 3,76
4. Peningkatan pendapatan: Mean = 4,05
5. Keberlanjutan usaha: Mean = 3,89

Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan kontribusi positif terhadap capaian ekonomi, khususnya dalam peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Namun demikian, nilai rata-rata yang relatif lebih rendah pada aspek pemantauan program mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme evaluasi dan tindak lanjut, yang berpotensi membatasi efektivitas program dalam jangka panjang.

Hasil Analisis Regresi

Untuk menguji pengaruh manajemen pemberdayaan terhadap capaian ekonomi, dilakukan analisis regresi linier berganda. Peningkatan ekonomi—yang diukur melalui indikator pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha—ditetapkan sebagai variabel dependen, sedangkan akses permodalan, efektivitas pelatihan, dan pemantauan program dijadikan sebagai variabel independen.

Table 1. Results of Multiple Linear Regression Analysis

Independent Variable	β Coefficient	t-value	Significance (p)
Access to Capital	0.421	4.87	0.000
Training Effectiveness	0.367	3.94	0.001
Program Monitoring	0.298	2.56	0.012
R^2	0.62		
F-statistic	61.43		0.000

Di antara variabel prediktor, akses permodalan menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap peningkatan ekonomi, diikuti oleh efektivitas pelatihan dan pemantauan program. Temuan ini menegaskan bahwa akses terhadap sumber pembiayaan masih menjadi faktor paling krusial bagi pelaku usaha mikro dan pekerja sektor informal dalam meningkatkan pendapatan serta menjaga keberlanjutan usaha.

Pembahasan

Dalam kesimpulan penelitian, peneliti perlu merangkum inti dari hasil yang telah diperoleh secara padat, jelas, dan menyeluruh. Kesimpulan harus disusun berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal, sehingga menunjukkan

apakah penelitian berhasil menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis yang diajukan. Kesimpulan memuat poin poin utama dari temuan penelitian tanpa mengulang data secara rinci, melainkan menekankan makna dan implikasinya. Selain itu, kesimpulan juga sebaiknya menyoroti kontribusi penelitian, baik dari sisi teoritis maupun praktis, serta kebaruan dari hasil yang dicapai.

Pengaruh kuat dan signifikan dari akses permodalan mendukung teori inklusi keuangan, yang menyatakan bahwa keterbatasan akses modal merupakan kendala utama bagi pertumbuhan usaha mikro di negara berkembang. Hasil ini sejalan dengan berbagai studi empiris yang menunjukkan bahwa skema pembiayaan mikro dan dana bergulir mampu meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha secara signifikan, terutama apabila disertai dengan dukungan manajerial yang memadai.

Efektivitas pelatihan juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap capaian ekonomi, sehingga memperkuat teori modal manusia yang menekankan bahwa pengembangan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi. Responden yang menilai program pelatihan relevan dan aplikatif melaporkan tingkat stabilitas pendapatan dan keberlanjutan usaha yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai pengembangan UMKM di Indonesia yang menekankan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.

Meskipun koefisien pemantauan program lebih rendah dibandingkan akses permodalan dan efektivitas pelatihan, variabel ini tetap menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemantauan berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan, khususnya melalui jaminan kontinuitas program dan akuntabilitas pelaksanaan. Namun, pengaruh yang relatif lebih lemah mencerminkan masih terbatasnya kualitas praktik pemantauan yang diterapkan.

Temuan kualitatif dari wawancara mendalam memberikan pemahaman kontekstual yang melengkapi hasil kuantitatif. Para informan secara konsisten mengungkapkan lemahnya koordinasi kelembagaan antar perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendukung. Fragmentasi kewenangan serta terbatasnya kolaborasi lintas sektor menyebabkan rendahnya koherensi dan efisiensi program, sehingga membatasi dampak potensial dari inisiatif pemberdayaan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemantauan program masih bersifat administratif, dengan fokus utama pada penyerapan anggaran dan jumlah peserta, bukan pada capaian sosial-ekonomi yang terukur. Kondisi ini menjelaskan rendahnya pengaruh variabel pemantauan dalam analisis kuantitatif serta menegaskan belum adanya sistem pemantauan berbasis hasil yang terintegrasi dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dari perspektif SDGs—khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat berkontribusi secara nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan stabilitas kerja apabila didukung oleh sistem manajemen yang kuat. Namun demikian, tanpa integrasi eksplisit indikator SDGs ke dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, kontribusi jangka panjang program terhadap pembangunan berkelanjutan masih terbatas.

Secara keseluruhan, bukti kuantitatif dan kualitatif yang dikombinasikan menegaskan bahwa program pemberdayaan yang tidak didukung oleh kerangka manajerial yang kuat cenderung menghasilkan manfaat jangka pendek, bukan transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan akses permodalan, peningkatan kualitas pelatihan, perbaikan koordinasi kelembagaan, serta penerapan sistem pemantauan yang berorientasi pada SDGs menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan dampak jangka panjang program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Studi empiris ini menyimpulkan bahwa manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat memainkan peran yang menentukan dan strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat lokal, sebagaimana dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bukti empiris dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan yang dikelola secara baik berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan stabilitas kerja di kalangan pelaku usaha mikro dan pekerja sektor informal.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa efektivitas program pemberdayaan secara keseluruhan masih dibatasi oleh berbagai kendala manajerial dan kelembagaan, khususnya lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas manajerial, serta belum tersedianya sistem pemantauan berbasis hasil yang selaras dengan indikator SDGs. Kendala-kendala tersebut mengurangi potensi inisiatif pemberdayaan untuk menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang bersifat jangka panjang dan transformatif, sehingga banyak program cenderung hanya memberikan manfaat jangka pendek dibandingkan capaian pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kualitas perencanaan, koordinasi kelembagaan, akses terhadap pembiayaan inklusif, serta penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang berorientasi pada SDGs merupakan prasyarat penting untuk memaksimalkan dampak program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi indikator SDGs ke dalam proses manajemen pemberdayaan memungkinkan pemerintah

daerah untuk bergerak melampaui akuntabilitas administratif menuju praktik pembangunan yang berbasis kinerja dan dampak nyata.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai program pembangunan, melainkan sebagai proses yang digerakkan oleh manajemen dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah di Indonesia maupun di wilayah berkembang lainnya yang berupaya melokalkan pencapaian SDGs melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis empiris dengan memasukkan data longitudinal, studi komparatif antarwilayah, serta penggunaan teknik kuantitatif yang lebih lanjut guna mengeksplorasi secara lebih mendalam dampak jangka panjang manajemen pemberdayaan terhadap pencapaian SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar. In *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara* (Vol. 7).
- Erfan Maulana, & Sofan Hariri Sarbini. (2025). Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pembangunan Daerah: Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 100–107. <https://doi.org/10.65369/259n9g72>
- Maulana, E. (2025). Pengaruh Kompetensi dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kompensasi sebagai Mediasi: Studi pada CV. Andaruni Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.65369/5fcq5b50>
- Maulana, E., & Berkatillah, A. (2025). Social Inequality and Inequal Access to Jobs (A Case Study of Street Buskers and Clowns in Hulu Sungai Utara Regency). *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)*, 13(2), 122–129. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika>
- Organisation for Economic Co-operation, & Development. (2018). *Policy coherence for sustainable development 2018: Towards sustainable and resilient societies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264301061-en>
- Prabowo, A., Setiawan, B., & Nugroho, R. (2021). Village-owned enterprises and local economic empowerment in Indonesia. *Journal of Rural Development*, 40(2), 243–260.
- Putra, A. R., Yulianto, E., & Hidayat, K. (2021). Institutional coordination and community empowerment programs in local governance. *Journal of Public Administration Research*, 11(2), 89–103.

- Rahman, F., & Widodo, T. (2022). Management effectiveness of BUMDes in supporting rural economic sustainability. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 24(1), 15–27. <https://doi.org/10.9744/jmk.24.1.15-27>
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). *Sustainable Development Report 2019*. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. <https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/>
- Suryadarma, D., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2020). Education Quality, Access, and Human Development in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 339–360. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798586>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations Development Programme. (2020). *Localizing the SDGs in Indonesia*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/indonesia/publications/localizing-sdgs-indonesia>
- World Bank. (2020). *Poverty and shared prosperity 2020: Reversals of fortune*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1602-4>